

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aset desa yang tidak ternilai harganya adalah berupa melimpahnya potensi desa pada berbagai bidang sejatinya merupakan aset desa yang tidak ternilai harganya, baik itu potensi SDM (sumber daya manusia) maupun SDA (sumber daya alam). UU No.6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 tentang desa disebutkan “Desa dianjurkan mempunyai suatu usaha yang berguna dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pokok dan ketersediaan sumber daya desa yang belum terpakai, serta tersedianya pengelolaan unit usaha yang kuat sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui unit usaha desa atau yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”. Selain itu, UU di atas menetapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang modalnya sepenuhnya atau sebagian besar dikelola oleh Desa melalui investasi langsung dari kekayaan Desa untuk mengelola aset, menyediakan layanan, dan menjalankan usaha lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes merupakan usaha desa yang digunakan oleh masyarakat untuk mendorong dan menampung seluruh kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat berdasarkan adat istiadat dan budaya setempat. Hasil usaha BUMDes dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa seperti, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan kepada masyarakat melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Keberadaan BUMDes diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini menjelaskan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai jawaban atas kebutuhan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (Fitri, 2021).

Bumdes telah berkembang pesat di Indonesia. Diketahui jumlah Bumdes dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Hal itu juga terjadi pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) khususnya di Provinsi Bali mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Bali menetapkan target agar semua desa di Bali memiliki BUMDes pada tahun 2023 (Dilansir dari TribunBali, 2019). Data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali, diketahui bahwa jumlah Bumdes di Bali sebanyak 568 dari 636 desa yang tersebar di 9 (sembilan) kabupaten di Bali di tahun 2022.

Data menunjukkan masih ada 68 desa yang belum membentuk Bumdes. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali tahun 2021, keberadaan BUMDes Karangasem diperingkat ketiga dari 9 kabupaten yang memiliki jumlah bumdes terbanyak yaitu sebanyak 71 bumdes yang tersebar. Namun pada tahun 2023 sudah tercatat 75 bumdes yang tersebar. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah Bumdes di Kabupaten Karangasem dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dan dari data tersebut juga diketahui bahwa Kabupaten Karangasem sudah memiliki secara keseluruhan atau 100% BUMDes di setiap desanya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem pada tahun 2024, keberadaan BUMDes di Karangasem yang di dukung berbagai kebijakan yang menaungi BUMDes Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa sampai saat ini para pengelola BUMDes belum mampu menyusun laporan keuangan dengan baik. Bahwa sejak awal berdirinya pengelolaan dan kebijakan, Di Karangasem, banyak BUMDes yang beroperasi dengan baik, tetapi beberapa masih gagal menjalankan program atau memanfaatkannya sesuai dengan peraturan. Salah satunya yaitu tidak melaporkan laporan keuangan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem. Ketepatan waktu laporan keuangan ialah salah satu karakter kualitatif yang wajib terpenuhi oleh laporan keuangan agar sejalan bagi pengambil keputusan. Laporan keuangan

yang tidak diserahkan tepat waktu. mengurangi nilai informasi dalam laporan pendanaan dan mengurangi kualitas laporan keuangan (Anom,2021)

Adapun data yang diperoleh peneliti mengenai BUMDes yang dinyatakan bermasalah dalam pelaporan keuangan karena tidak melaporkan laporan keuangan BUMDes ke Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data BUMDes yang tidak melaporkan
laporan keuangan pada tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Bumdes	Bumdes Yang Tidak Melaporkan Tahun 2023
1	RENDANG	6	3
2	SIDEMEN	10	6
3	MANGGIS	12	4
4	KARANGASEM	8	2
5	ABANG	14	7
6	BEBANDEM	8	6
7	SELAT	8	6
8	KUBU	9	5
	JUMLAH	75	39

Sumber : DPMD Kabupaten Karangasem 2023

Pada tabel 1.1 di atas diketahui bahwa terdapat sebanyak 39 BUMDes dari 75 BUMDes yang ada di Kabupaten Karangasem terlambat atau tidak melaporkan laporan keuangan ke Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem periode tahun 2023. Dari data tersebut diketahui bahwa presentasi BUMDes yang tidak melaporkan laporan keuangan mencapai 52% atau bisa dikatakan setengah dari BUMDes tidak melaporkan laporan keuangannya. Terdapat beberapa alasan BUMDes tidak melakukan pelaporan keuangannya yaitu kurangnya keterampilan para pengurus BUMDes dalam melaksanakan tugasnya, kurangnya pelatihan penyusunan laporan, terdapat beberapa BUMDes yang system informasi akuntansi masih sederhana sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk membuat laporan keuangan dan kurangnya pengendalian internal dimana kurang tegasnya peraturan yang ada sehingga menghasilkan pelaporan keuangan yang kurang akurat dan akan menyebabkan terlambatnya penyusunan

pelaporan keuangan, hal ini membuat laporan hasil keuangan yang tidak dapat diandalkan dan tidak relevan untuk pengambilan keputusan.

Sejalan dengan fenomena yang terjadi di Karangasem terkait laporan keuangan BUMDES. Terjadi permasalahan laporan keuangan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncara Giri, Sibetan, Karangasem, pada tahun 2023 hal ini terjadi dikarenakan adanya laporan keuangan yang tidak balance. Untuk menyasati hal tersebut terdakwa selaku bendahara, disuruh membuat nota fiktif sehingga laporan menjadi balance (Dilansir dari Berita BaliPost, 2023). Permasalahan laporan keuangan juga terjadi pada Badan Usaha Milik Desa Kerta Buana, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem karena BUMDes tidak melakukan pembukuan serta pencatatan keuangan. Serta dana BUMDes tidak disimpan dalam rekening BUMDes sehingga menimbulkan permasalahan dilaporan keuangan yang mengakibatkan kerugian. (Dilansir dari berita denpasar.kompas.com, 2023). Berdasarkan pernyataan di atas, BUMDes harus memiliki laporan keuangan yang memadai untuk menunjukkan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja finansial organisasi. Laporan keuangan harus bermanfaat bagi pengguna dan membantu mereka membuat keputusan. Jika informasi dapat dipahami, itu akan bermanfaat.

Laporan keuangan yang relevan, dapat dipercaya, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami merupakan standar dan komponen yang menentukan kualitas laporan keuangan serta informasinya (Sukarini, 2018). Kualitas laporan keuangan sangat penting untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan BUMDes, karena laporan keuangan yang berkualitas berperan krusial dalam hal tersebut, BUMDes dapat menjalin kerja sama dengan pihak perbankan dan memperoleh penambahan pendanaan seperti contoh BUMDes yang terdapat di Menanga Kabupaten Karangasem diketahui bahwa kualitas laporan keuangan sangat baik sehingga BUMDes tersebut dapat menjalin Kerjasama dengan Bank BRI dalam program BRILink. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak pengurus BUMDes yang masih gagal menyusun laporan keuangan dengan benar, yang menyebabkan laporan keuangan tersebut dianggap buruk.

Bentuk pertanggungjawaban pengelola BUMDes yaitu rutin membuat laporan keuangan hanya saja laporan yang dibuat berupa laporan keuangan seadanya dan belum memenuhi standar akuntansi yang seharusnya. Hal ini dikarenakan pengelola BUMDes belum seluruhnya tahu dan paham siklus akuntansi dan standar akuntansi yang digunakan. Hal ini terlihat dari disiplin ilmu aparat pengelola BUMDes yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan BUMDes. Karena minimnya pelatihan atau seminar yang memberikan keterampilan dan pengetahuan dalam mencatat dan melaporkan pengelolaan keuangan BUMDes.

Meningkatkan kemampuan menyusun laporan keuangan, pelatihan yang sesuai harus diberikan. Pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan sangat penting bagi para penyusun laporan keuangan, karena pelatihan ini sangat membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam menyusun laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Penelitian (Alhamzah et al., 2022) menjelaskan bahwa pelatihan penyusunan laporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sejalan dengan penelitian (Sukriani et al., 2018) yang menyatakan bahwa pelatihan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dibuat. Artinya, pengurus BUMDes di Kabupaten Karangasem memerlukan pelatihan penyusunan laporan keuangan agar mereka memahami dan memiliki keterampilan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) yang telah ditetapkan.

Adanya perkembangan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini, telah memberikan banyak perubahan seperti yang tadinya segala transaksi keuangan dilakukan secara manual menjadi lebih terkomputerisasi dan menjadi lebih efektif serta efisien. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah salah satu sistem informasi yang sangat membantu dalam pengelolaan keuangan. SIA mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data transaksi keuangan untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi tentu akan dapat membantu dalam perkembangan serta kemajuan BUMDes, sehingga informasi yang dihasilkan akan lebih akurat dan keputusan yang

diambil atas informasi tersebut akan akurat juga. Apabila informasi yang diterima oleh sistem informasi akuntansi memenuhi harapan pengguna dan dapat memuaskan pengguna baik internal maupun eksternal, sistem tersebut dapat dianggap baik. Penelitian (Sari, 2021) menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dibuat. Namun (Nur et al., 2023) dalam penelitiannya menyangkal bahwa sistem informasi akuntansi justru tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dibuat.

Pengendalian intern mengatur, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ini juga penting untuk mencegah dan menemukan penggelapan, sehingga laporan keuangan memberikan kepercayaan. (Wardani dan Andriyani, 2017). Untuk memantau aktiva entitas, memverifikasi keakuratan dan kemahiran akuntansi, meningkatkan ketepatan, dan meningkatkan kepatuhan kebijakan manajemen, pengendalian intern mencakup struktur organisasi yang terkoordinasi, teknik, dan kegiatan (Mulyadi, 2013). Menurut Human et al. (2020) perusahaan dapat mempertahankan kekayaan secara preventif, detectif, dan korektif melalui pengendalian intern yang baik dan praktik tata kelola keuangan yang kuat. Ini juga dibuktikan dalam penelitian (Nur et al., 2023) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan dalam beberapa kasus. Namun, penelitian lain (Lestari, 2020) menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak memengaruhi kualitas laporan keuangan secara signifikan. Kualitas laporan keuangan yang dibuat tidak terpengaruh oleh kemajuan atau kemunduran sistem pengendalian internal.

Seperti halnya pelatihan penyusunan laporan, sistem informasi akuntansi, dan pengendalian internal faktor, kompetensi sumber daya manusia juga merupakan komponen tambahan yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan BUMDes. Karena ketika ada profesionalisme dan Jika sumber daya manusia (SDM) mampu mengelola keuangan BUMDes, tujuan ekonomi dan sosial masyarakat desa dapat tercapai. Ini karena banyak masyarakat desa yang belum memahami atau bahkan tidak tahu cara membuat

laporan keuangan, sehingga diperlukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa.

Kompetensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang didasarkan pada keterampilan dan pengetahuan seseorang serta didukung oleh sikap kerja yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut (Wibowo., 2012). Sumber daya manusia harus mempertimbangkan tingkat kompetensi karena seseorang yang tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugasnya akan berkinerja buruk. Kecurangan adalah masalah yang akan muncul dari seseorang yang tidak berprestasi. Tidak peduli seberapa bagus sistem dan prosedur kerja, mereka tidak akan berhasil jika karyawan yang menjalankannya tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Untuk menyelesaikan masalah ini, penting untuk mempertimbangkan tingkat kompetensi, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas tertentu. Penelitian (Lestari, 2020) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kemampuan tenaga kerja. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dibuat dengan kualitas yang lebih baik akan dihasilkan sebagai hasil dari peningkatan kemampuan karyawan.

Sejalan dengan studi Ketut Anom (2021), sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kompetensi SDM memengaruhi kualitas pelaporan keuangan di lembaga perkreditan desa sekecamatan kubu. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena pertama menambah variabel pelatihan penyusunan laporan, alasan dipilih variabel tersebut karena pada dasarnya pelatihan penyusunan laporan yang dilaksanakan secara efektif dan rutin pada suatu badan usaha mampu menunjang/mempercepat ketercapaian target yang telah ditetapkan baik pada lingkup keuangan.

Penelitian ini juga dilakukan pada tempat yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu pada BUMDes se-kabupaten Karangasem. Alasan peneliti memakai lokasi di Kabupaten Karangasem karena dilatarbelakangi oleh permasalahan BUMDes di Kabupaten Karangasem pada observasi yang dilakukan di Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa sampai saat ini BUMDes di Kabupaten

Karangasem perkembangan BUMDes cukup pesat bahkan sudah secara keseluruhan di setiap desa terdapat BUMDes, akan tetapi tidak sedikit pula BUMDes yang tidak melaporkan laporan keuangannya bahkan hingga setengah dari jumlah BUMDes yang tidak melaporkan laporan keuangannya.

Teori agensi (*agency theory*) merupakan teori utama yang digunakan dalam penelitian ini. Teori ini mencerminkan hubungan antara pihak principal dan pihak agen, didalam sebuah organisasi, di mana keduanya memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Jensen dan Meckling pertama kali memperkenalkan teori agensi pada tahun 1976 dalam (Damanhuri & Pande, 2020). BUMDes berfungsi sebagai agen dalam keagenan penelitian ini dan pada dasarnya bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan oleh principal yaitu desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa, sebagai agen wajib melakukan penyusunan laporan keuangan yang disampaikan setiap tahunnya sebagai LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dan diserahkan kepada Desa serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Forum Permusyawaratan Desa (Musdes). Sehingga laporan akuntansi yang berkualitas, disampaikan secara tepat waktu, dapat menarik minat masyarakat sebagai pemangku kepentingan dan juga pemangku kepentingan lainnya untuk menanamkan modalnya pada BUMDes.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pelatihan Penyusunan Laporan, Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUMDes Kabupaten Karangasem”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Ketidaktepatan waktu untuk menyampaikan pelaporan keuangan
2. Minimnya pelatihan atau seminar yang memberikan keterampilan dan pengetahuan dalam mencatat dan melaporkan pengelolaan keuangan BUMDes.

3. Kurangnya pemahaman dan kemampuan yang dimiliki SDM dalam mengelola keuangan dan menyusun laporan keuangan tepat dan benar pada usaha yang dijalankan oleh BUMDes.
4. Sejauh ini, kebanyakan BUMDes belum memanfaatkan system informasi akuntansi secara maksimal.

1.3. Pembatasan Masalah

Melalui uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah penelitian yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan BUMDes. Maka peneliti hanya membatasi permasalahan pada “Pelatihan Penyusunan Laporan , Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUMDes Kabupaten Karangasem”.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pelatihan penyusunan laporan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes Kabupaten Karangasem?
2. Bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes Kabupaten Karangasem?
3. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes Kabupaten Karangasem?
4. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes Kabupaten Karangasem?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis:

1. Pengaruh pelatihan penyusunan laporan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes Kabupaten Karangasem.

2. Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes Kabupaten Karangasem
3. Pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes Kabupaten Karangasem.
4. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes Kabupaten Karangasem.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis tentang adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan untuk memperluas wawasan serta pengetahuan mengenai penyelesaian permasalahan dan mengatasi kesulitan dalam pencapaian kinerja yang baik pada Bumdes. Serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya bagi mereka yang nantinya ingin meneliti atau memperdalam pengetahuan mengenai Pengaruh Pelatihan Penyusunan Laporan, Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUMDes.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai pengaruh pelatihan penyusunan laporan, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan bumdes.

2. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga dan menambah sumber bacaan ilmiah atau referensi serta dapat sebagai pembanding bagi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian.

3. Bagi Bumdes

Penelitian ini diharapkan mampu membagikan informasi yang nantinya dapat digunakan oleh BUMDes serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pemikiran oleh BUMDes agar mampu lebih melakukan peningkatan terhadap kualitas dari laporan keuangan BUMDes.

